

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pola kondisi akses air minum di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 melalui Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan (PDRB per kapita ADHK), kepadatan penduduk, dan Indeks Kualitas Air (IKA) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik kondisi ekonomi, demografis, dan lingkungan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dari sisi ekonomi, terdapat kesenjangan PDRB per kapita yang mencolok antara wilayah berbasis industri dan jasa seperti Kota Bekasi dengan wilayah yang masih didominasi sektor primer seperti Kabupaten Cianjur. Dari sisi demografis, kepadatan penduduk tertinggi terkonsentrasi di wilayah perkotaan, dengan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu contohnya. Sementara dari sisi lingkungan, nilai IKA menunjukkan rentang yang sangat lebar, di mana Kota Cimahi mencatat nilai terendah akibat akumulasi beban pencemaran domestik dan industri, sedangkan Kabupaten Ciamis mencatat nilai tertinggi dengan kondisi badan air yang relatif lebih terjaga.
2. Kombinasi kondisi yang berasosiasi dengan tingginya capaian akses air minum layak di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada jalur konfigurasi yang kedua, mencakup wilayah Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang dengan PDRB per kapita tinggi dan IKA tinggi. Jalur ini mencerminkan kondisi di mana kapasitas ekonomi wilayah yang memadai berjalan beriringan dengan ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, sehingga secara bersama-sama mendukung penyediaan dan perluasan layanan air minum layak yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Kombinasi kondisi yang berasosiasi dengan rendahnya capaian akses air minum ditunjukkan pada jalur konfigurasi yang pertama, mencakup wilayah

Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kota Depok dengan kepadatan penduduk rendah dan IKA rendah. Jalur ini mencerminkan kondisi di mana rendahnya tekanan demografis tidak serta-merta menjamin terpenuhinya akses air minum layak apabila tidak didukung oleh kualitas sumber air baku yang memadai. Pencemaran yang tinggi pada badan air di wilayah-wilayah tersebut menyebabkan biaya pengolahan air menjadi lebih besar dan kompleks, sehingga menghambat perluasan layanan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.

5.2 Saran

a) Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan kondisi kausal dengan memasukkan variabel-variabel lain yang relevan untuk menghasilkan konfigurasi kausal yang lebih komprehensif dan representatif dalam menjelaskan fenomena akses air minum layak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data yang mencakup beberapa periode waktu sehingga dapat menangkap dinamika perubahan konfigurasi kondisi secara berkala. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pergeseran kondisi ekonomi, demografis, dan lingkungan memengaruhi arah capaian akses air minum di suatu wilayah dari waktu ke waktu.

b) Aspek Praktis

Secara praktis, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki PDRB per kapita tinggi dan IKA yang baik perlu memastikan bahwa kedua keunggulan tersebut dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan investasi infrastruktur air minum perpipaan yang merata hingga ke wilayah terpencil, agar capaian akses yang tinggi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi namun IKA yang rendah seperti Kota Cimahi dan Kota Bekasi disarankan untuk memprioritaskan program pengendalian

pencemaran badan air secara terpadu, mencakup penertiban pembuangan limbah domestik dan industri, sebagai prasyarat agar perluasan akses air minum dapat berjalan secara efektif dan tidak terhambat oleh tingginya biaya pengolahan air baku. Pemerintah daerah di Jawa Barat disarankan untuk mengintegrasikan perencanaan penyediaan air minum dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi daerah, sehingga peningkatan kapasitas ekonomi wilayah dapat secara langsung mendorong perbaikan kualitas sumber air dan perluasan layanan air minum yang adil, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.